



**DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

MODUL

PENJELASAN KUESIONER

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No 20 Tahun 2018

**ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN
SISTEM KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA**

INSTRUKSI PENGGUNAAN
FILE EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
(sesuai PermenPANRB No 20 Tahun 2018)

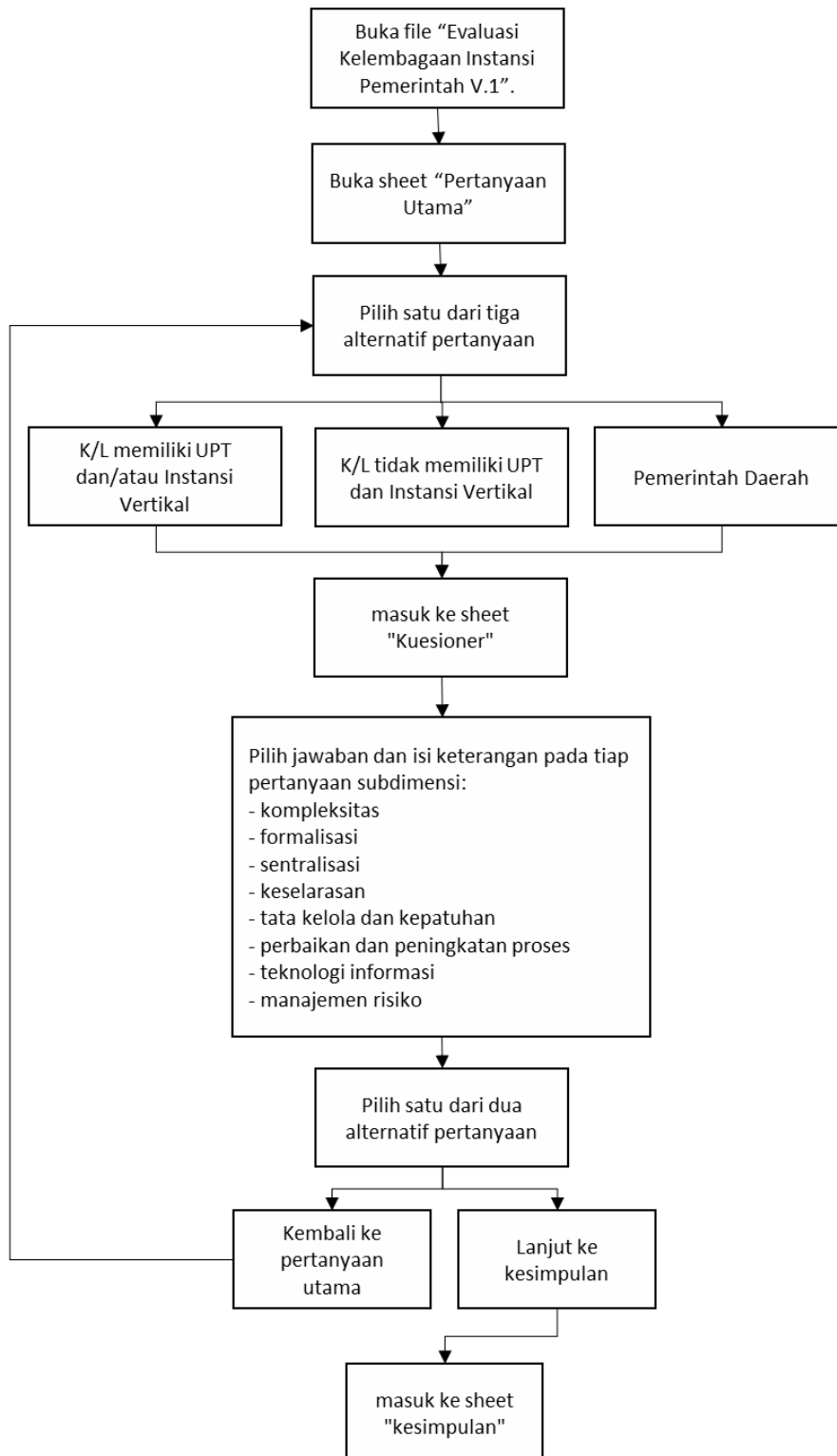
A. Dasar Peraturan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Peraturan ini mengatur pedoman melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan 2 (dua) dimensi yaitu dimensi struktur organisasi dan dimensi proses, yang masing-masing dimensi terdiri dari subdimensi. Setiap subdimensi mempunyai bobot yang berbeda. Adapun pembobotan adalah sebagai berikut:

Dimensi	Bobot dari Nilai Dimensi	Bobot dari Nilai Total Keseluruhan
Struktur Organisasi (50 %)	Kompleksitas Struktur (50 %)	Kompleksitas Struktur (25 %)
	Formalisasi Struktur (25 %)	Formalisasi Struktur (12,5 %)
	Sentralisasi Struktur (25 %)	Sentralisasi Struktur (12,5 %)
Proses (50 %)	Keselarasan (Alignment) (20 %)	Keselarasan (Alignment) (10 %)
	Tata Kelola (Governance) dan Ketaatan (Compliance) (20 %)	Tata Kelola (Governance) dan Ketaatan (Compliance) (10 %)
	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20 %)	Perbaikan dan Peningkatan Proses (10 %)
	Teknologi Informasi (20 %)	Teknologi Informasi (10 %)
	Manajemen Risiko (20 %)	Manajemen Risiko (10 %)
Total		100 %

B. Flowchart Penggunaan File Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah



C. Instruksi Penggunaan

1. Buka file excel “Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah V.1.3”.
2. Buka sheet “Pertanyaan Utama” sehingga muncul tampilan sebagai berikut:



3. Terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu
 - a. Kementerian/Lembaga memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal; atau
 - b. Kementerian/Lembaga tidak memiliki UPT dan Instansi Vertikal; atau
 - c. Pemerintah Daerah.

Pilih sesuai dengan karakteristik instansi pemerintah bapak/ibu.

Contoh:

- Instansi Pemerintah A memiliki UPT dan Instansi Vertikal, maka **tekan** pilihan

KEMENTERIAN/LEMBAGA
memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal

- Instansi Pemerintah B memiliki UPT namun tidak memiliki Instansi Vertikal, maka **tekan** pilihan

KEMENTERIAN/LEMBAGA
memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal

- Instansi Pemerintah C tidak memiliki UPT namun memiliki Instansi Vertikal, maka **tekan** pilihan

KEMENTERIAN/LEMBAGA
memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal

- Instansi Pemerintah C tidak memiliki UPT dan tidak memiliki Instansi Vertikal, maka **tekan** pilihan

KEMENTERIAN/LEMBAGA
tidak memiliki UPT dan Instansi Vertikal

- Instansi Pemerintah D merupakan Instansi Pemerintah Daerah, maka **tekan** pilihan

PEMERINTAH DAERAH

4. Setelah tekan pilihan sesuai karakteristik instansi pemerintah bapak/ibu, maka akan masuk ke dalam sheet “Kuesioner”, sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SS	
2	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks.	SS	
3	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana.	SS	
4	Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.	SS	
5	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum.	SS	
6	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik.	SS	
7	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SS	

- Pilihan jawaban pada setiap pertanyaan yang ada di setiap subdimensi dengan 4 pilihan jawaban yaitu STS (Sangat Tidak Setuju) atau TS (Tidak Setuju) atau S (Setuju) atau SS (Sangat Setuju).
- Isi Kolom Keterangan pada setiap pertanyaan untuk menguatkan pilihan jawaban.

Adapun ketentuan jumlah pertanyaan yang harus diisi adalah:

Subdimensi	K/L dengan UPT dan/atau Instansi Vertikal	K/L tanpa UPT dan Instansi Vertikal	Pemerintah Daerah
Kompleksitas Struktur	15	11	14
Formalisasi Struktur	7	7	7
Sentralisasi Struktur	11	11	11
Keselarasan	8	8	8
Tata Kelola dan Kepatuhan	7	7	7
Perbaikan dan Peningkatan Proses	4	4	4
Teknologi Informasi	5	5	5
Manajemen Risiko	6	6	6
Jumlah	63	59	62

- Setelah dipilih dan diisi semua pertanyaan yang ada, di bagian bawah terdapat pilihan sebagai berikut:

KEMBALI KE PERTANYAAN UTAMA	LANJUT KE KESIMPULAN
-----------------------------	----------------------

Tekan kembali pertanyaan utama untuk kembali ke sheet pertanyaan utama atau tekan lanjut ke kesimpulan, untuk mengetahui hasil dari evaluasi kelembagaan.

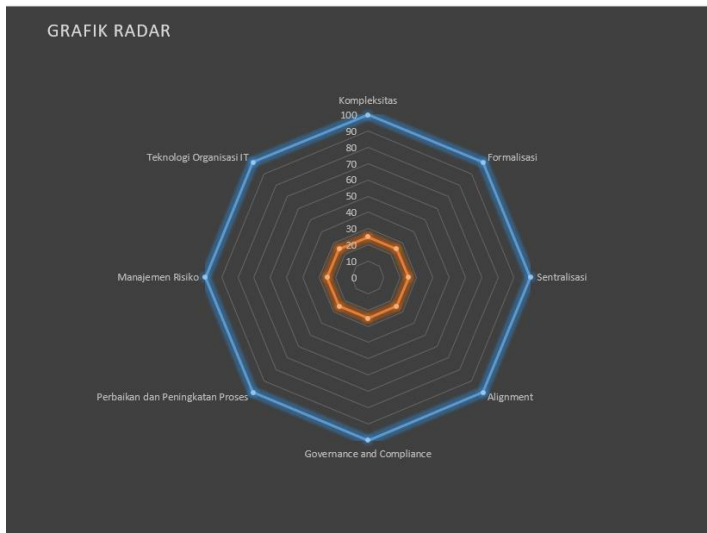
5. Apabila pilih “Lanjut ke Kesimpulan” maka akan masuk ke sheet “Kesimpulan”, dan muncul tampilan sebagai berikut:

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari	
			max
Kompleksitas	6,25	✓	75%
Formalisasi	3,125	✓	75%
Sentralisasi	3,125	✓	75%
TOTAL	12,5		75%
Alignment	2,5	✓	75%
Governance and Compliance	2,5	✓	75%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	2,5	✓	75%
Manajemen Risiko	2,5	✓	75%
Teknologi Organisasi IT	2,5	✓	75%
TOTAL	12,5		75%
Peringkat Komposit		✓	25

Scroll ke bawah maka akan muncul tampilan penuh sebagai berikut:

KETERANGAN	P-2	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Kurang efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Kurang mampu
	Kekurangan	Kelemahan serius

Scroll lagi ke bawah untuk melihat grafik radar:



--oo00oo--

Penjelasan Kuesioner

Parameter, Indikator dan Penjelasan Kuesioner Evaluasi Organisasi

Parameter Kuesioner dan Definisinya

Parameter	Definisi
Sangat Tidak Setuju (STS)	Sepenuhnya tidak menyetujui pernyataan
Tidak Setuju (TS)	Sebagian besar tidak menyetujui pernyataan
Setuju (S)	Sebagian besar menyetujui pernyataan
Sangat Setuju (SS)	Sepenuhnya menyetujui pernyataan

a. DIMENSI STRUKTUR

1. SUBDIMENSI KOMPLEKSITAS

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
1.	Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian desain (bentuk/model) organisasi dengan nomenklatur (penamaan jabatan), kedudukan, tugas, fungsi, besaran unit organisasi dan jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PANRB.
		STS (1)	Tidak diperlukan penyesuaian desain organisasi karena secara menyeluruh telah sesuai/selaras dengan ketentuan dan peraturan.
		TS (2)	Tidak diperlukan penyesuaian desain organisasi karena sebagian besar telah sesuai/selaras dengan ketentuan dan peraturan.
		S (3)	Perlu penyesuaian desain organisasi karena sebagian besar tidak sesuai/selaras dengan ketentuan dan peraturan.
		SS (4)	Perlu penyesuaian desain organisasi secara menyeluruh karena banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan dan peraturan.
2.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kedudukan,

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
	yang ada bersifat terlalu kompleks .		tugas, fungsi dan besaran unit organisasi yaitu apakah ada/tidak yang melebihi kebutuhan organisasi, ada/tidaknya indikasi tumpang tindih (<i>overlap</i>) baik secara horizontal (terlalu melebar) maupun secara vertikal (terlalu berjenjang ke bawah) pada desain (bentuk/model) organisasi.
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi desain organisasi bersifat terlalu kompleks.
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar desain organisasi tidak bersifat terlalu kompleks.
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar desain organisasi bersifat terlalu kompleks.
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh desain organisasi bersifat terlalu kompleks.
3.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat terlalu sederhana .	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kedudukan, tugas, fungsi, dan besaran unit organisasi, yaitu apakah ada/tidak yang terlalu sederhana/kekurangan, ada/tidak indikasi ukuran desain organisasi yang kurang ideal baik secara horizontal (terlalu sempit), secara vertikal (kurang berjenjang ke bawah) maupun secara spasial (terlalu terpusat).
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi desain organisasi bersifat terlalu sederhana.
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar desain organisasi tidak bersifat terlalu sederhana.
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar desain organisasi bersifat terlalu sederhana.
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh desain organisasi bersifat terlalu sederhana.
4.	Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini (dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah) perlu disesuaikan tugas dan fungsinya.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penguraian atau penjabaran tugas dan fungsi (<i>cascading</i>) dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai dengan tingkatan unit organisasi paling bawah.
		STS (1)	Seluruh jenjang pada unit organisasi tidak perlu disesuaikan tugas dan fungsinya karena telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		TS (2)	Sebagian besar jenjang pada unit organisasi tidak perlu disesuaikan karena penjabaran tugas dan fungsinya telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		S (3)	Sebagian besar jenjang pada unit organisasi perlu disesuaikan tugas dan fungsinya karena belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		SS (4)	Seluruh jenjang unit organisasi perlu disesuaikan tugas dan fungsinya karena belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum .	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tugas atau fungsi dalam struktur organisasi bersifat terlalu umum dan belum mencerminkan spesialisasi yang jelas. Contohnya apabila terdapat tugas A, B dan C yang seharusnya terpisah namun dilaksanakan pada satu unit organisasi.
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi adanya tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang bersifat terlalu umum.
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar tugas dan fungsi dalam struktur organisasi tidak memiliki sifat yang terlalu umum.
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar tugas dan fungsi dalam struktur organisasi bersifat terlalu umum .
		SS (4)	Terdapat indikasi bahwa seluruh tugas dan fungsi dalam struktur organisasi bersifat terlalu umum .
6.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik .	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tugas atau fungsi dalam struktur organisasi terlalu spesifik dan mencerminkan spesialisasi yang berlebihan (<i>overspecialization</i>). Misalnya siklus suatu tugas dan fungsi pada beberapa unit organisasi yang juga melaksanakan hal yang sama (tugas dan fungsi A dilaksanakan oleh unit organisasi A1, A2, A3 dan A4)

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi tingkatan unit organisasi ada yang tugas dan fungsinya bersifat terlalu spesifik.
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar tugas dan fungsi pada tingkatan unit organisasi tidak bersifat terlalu spesifik.
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar tingkatan unit organisasi ada yang tugas dan fungsinya bersifat terlalu spesifik.
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh tugas atau fungsi pada tingkatan unit organisasi bersifat terlalu spesifik.
7.	Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. <i>(khusus Pemda)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perangkat daerah telah ditetapkan dan ditata sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi perangkat daerah sesuai dengan pewadahan dan/atau perumpunan
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar perangkat daerah tidak sesuai dengan pewadahan dan/atau perumpunan
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar perangkat daerah telah sesuai dengan pewadahan dan/atau perumpunan
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh perangkat daerah telah sesuai dengan pewadahan dan/atau perumpunan
8.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. <i>(khusus K/L)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini untuk dimaksudkan untuk mengetahui apakah masih diperlukan penyesuaian instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada dengan ketentuan peraturan perundangan
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi bahwa instansi vertikal atau kantor regional atau UPT perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan
		TS (2)	Terdapat indikasi bahwa sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
			UPT sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
		S (3)	Terdapat indikasi bahwa sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT memerlukan penyesuaian
		SS (4)	Terdapat indikasi bahwa seluruh instansi vertikal atau kantor regional atau UPT memerlukan penyesuaian
9.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi. <i>(khusus K/L)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk mendukung secara sinergis tercapainya tujuan organisasi
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi instansi vertikal atau kantor regional atau UPT mendukung tercapainya tujuan organisasi
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT tidak mendukung secara sinergis tercapainya tujuan organisasi
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT mendukung secara sinergis tercapainya tujuan organisasi
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh instansi vertikal atau kantor regional atau UPT mendukung secara sinergis tercapainya tujuan organisasi
10.	Jumlah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan. <i>(khusus K/L)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT tidak menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh instansi vertikal atau kantor regional atau UPT menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan
11.	Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan <i>(khusus K/L)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan
12.	Jumlah Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan. <i>(khusus Pemda)</i>	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah cabang dinas/UPTD yang dibentuk melebihi kebutuhan
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi cabang dinas/UPTD yang dibentuk melebihi kebutuhan
		TS (2)	Terdapat indikasi sebagian besar Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk tidak melebihi kebutuhan
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk melebihi kebutuhan
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk melebihi kebutuhan
13.	Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk dinilai	Penjelasan Umum	Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah cabang dinas/UPTD yang

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
	secara sinergis mendukung tercapainya tujuan pembentukan organisasi. <i>(khusus Pemda)</i>		dibentuk mendukung tercapainya tujuan organisasi
		STS (1)	Tidak terdapat indikasi cabang dinas/UPTD yang dibentuk mendukung tercapainya tujuan organisasi
		TS (2)	Terdapat indikasi seluruh cabang dinas/UPTD secara sinergis tidak mendukung tercapainya tujuan organisasi
		S (3)	Terdapat indikasi sebagian besar cabang dinas/UPTD secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi
		SS (4)	Terdapat indikasi seluruh cabang dinas/UPTD secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi
14.	Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian nomenklatur (penamaan jabatan) pada unit organisasi dengan tugas dan fungsi.
		STS (1)	Seluruh nomenklatur unit organisasi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
		TS (2)	Sebagian besar nomenklatur unit organisasi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
		S (3)	Sebagian besar nomenklatur pada unit organisasi perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
		SS (4)	Seluruh nomenklatur pada unit organisasi perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
15.	Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jenjang jabatan yang ada saat ini dinilai melebihi atau kurang dari yang dibutuhkan.
		STS (4)	Seluruh jenjang jabatan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		TS (3)	Sebagian besar jenjang jabatan yang ada saat ini dinilai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		S (2)	Sebagian besar jenjang jabatan yang ada saat ini cukup sesuai dengan yang dibutuhkan.

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		SS (1)	Seluruh jenjang jabatan yang ada saat ini telah-sesuai dengan yang dibutuhkan.
16.	Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian jenjang jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi sampai Jabatan Pengawas) pada organisasi dengan kebutuhan organisasi. Responden diharapkan menilai dan memberikan persepsi berdasarkan kurun waktu satu tahun terakhir, yaitu bagaimana kondisi jenjang jabatan bila dikaitkan dengan jumlah kebutuhan organisasi serta apakah terdapat indikasi atau gejala kelebihan jumlah jenjang jabatan pada organisasi.
		STS (4)	Seluruh jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		TS (3)	Sebagian besar jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		S (2)	Sebagian besar jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		SS (1)	Seluruh jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
17.	Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemenuhan keberadaan jabatan-jabatan fungsional yang ada berdasarkan kebutuhan organisasi. Responden diharapkan memberikan penilaian atau menyampaikan persepsi sejauh mana keberadaan jabatan-jabatan fungsional tersebut yakni melebihi kebutuhan organisasi atau belum memenuhi kebutuhan organisasi.
		STS (4)	Seluruh jabatan-jabatan fungsional belum/tidak memenuhi kebutuhan.
		TS (3)	Sebagian besar jabatan-jabatan fungsional belum/tidak memenuhi kebutuhan
		S (2)	Sebagian besar jabatan-jabatan fungsional telah memenuhi kebutuhan organisasi.
		SS (1)	Seluruh jabatan-jabatan fungsional telah memenuhi kebutuhan organisasi.

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
18.	Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat peranan jabatan fungsional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pada tugas dan fungsi organisasi atau justru menghambat tugas dan fungsi organisasi.
		STS (4)	Penempatan jabatan-jabatan fungsional secara menyeluruh belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.
		TS (3)	Sebagian besar penempatan jabatan-jabatan fungsional belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.
		S (2)	Sebagian besar penempatan jabatan-jabatan fungsional telah mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.
		SS (1)	Penempatan seluruh jabatan-jabatan fungsional telah mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.

2. SUBDIMENSI FORMALISASI

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
1.	Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seluruh tugas dan fungsi yang ada di unit organisasi telah ada dan dituangkan secara cukup lengkap dan rinci sesuai strategi organisasi serta ditetapkan secara resmi.
		STS (4)	Seluruh tugas dan fungsi unit organisasi telah dirumuskan sesuai dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		TS (3)	Sebagian besar tugas dan fungsi unit organisasi telah dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		S (2)	Sebagian besar tugas dan fungsi unit organisasi perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		SS (1)	Seluruh tugas dan fungsi yang ada di unit organisasi perlu dirumuskan dengan jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
2.	Tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan setiap tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih rendah (di bawahnya) telah dituangkan lebih jelas ke dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tata cara atau mekanisme tersebut telah ada dan dituangkan secara lengkap dan rinci serta ditetapkan secara resmi/formal.
		STS (1)	Seluruh tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan setiap tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih rendah perlu dituangkan dengan jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum dalam organisasi.
		TS (2)	Sebagian besar tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan setiap tingkatan yang lebih tinggi sampai ke tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih rendah perlu dituangkan dengan jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum dalam organisasi.

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		S (3)	Sebagian besar tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan setiap tingkatan yang lebih tinggi sampai ke tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih rendah telah dituangkan dengan jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum dalam organisasi.
		SS (4)	Seluruh tata cara atau mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan setiap tingkatan yang lebih tinggi sampai ke tingkatan manajemen atau unit organisasi yang lebih rendah telah dituangkan dengan jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum dalam organisasi.
3.	Mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi perlu dirumuskan lebih jelas lagi di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi telah ada dan dituangkan secara lengkap dan rinci serta ditetapkan secara resmi
		STS (4)	Seluruh mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi telah dirumuskan dengan jelas di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		TS (3)	Sebagian besar mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi telah dirumuskan dengan jelas di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		S (2)	Sebagian besar mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi sebagian kecil perlu dirumuskan lebih jelas lagi di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
		SS (1)	Mekanisme hubungan dan koordinasi antar unit organisasi secara menyeluruh perlu dirumuskan lebih jelas lagi di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
4.	Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kejelasan penjabaran tentang rencana strategis di dalam keputusan resmi organisasi.
		STS (1)	Seluruh rencana strategis belum dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		TS (2)	Sebagian besar rencana strategis belum dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
		S (3)	Sebagian besar rencana strategis telah dituangkan dengan jelas di dalam keputusan resmi organisasi
		SS (4)	Seluruh rencana strategis telah dituangkan dengan jelas di dalam keputusan resmi organisasi
5.	Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah ditetapkan secara resmi (lengkap dan rinci) terkait kelengkapan dan perincian pelaksanaan tugas dan fungsi (peta proses bisnis dan SOP)
		STS (1)	Seluruh kebijakan-kebijakan organisasi belum ditetapkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.
		TS (2)	Sebagian besar kebijakan-kebijakan organisasi belum ditetapkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.
		S (3)	Sebagian besar kebijakan-kebijakan organisasi telah ditetapkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.
		SS (4)	Seluruh kebijakan-kebijakan organisasi telah ditetapkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.
6.	Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seluruh proses kerja telah ada dan dituangkan secara lengkap, jelas rinci, dan berurutan serta ditetapkan secara resmi.
		STS (1)	Seluruh proses kerja belum/tidak dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
		TS (2)	Sebagian besar proses kerja belum/tidak dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
		S (3)	Sebagian besar proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.

No.	Pernyataan	Parameter	Keterangan
		SS (4)	Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur
7	Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah standar pelayanan publik terkait pelaksanaan tugas dan fungsi (dasar hukum pelayanan, standarisasi sarana dan prasarana, pengawasan internal, jumlah pelaksana) telah ditetapkan secara resmi, lengkap, dan rinci.
		STS (1)	Seluruh standarisasi pelayanan belum/tidak diformalkan.
		TS (2)	Sebagian besar standarisasi pelayanan belum/tidak diformalkan.
		S (3)	Sebagian besar standarisasi pelayanan telah diformalkan.
		SS (4)	Seluruh standarisasi pelayanan telah diformalkan.

3. SUBDIMENSI SENTRALISASI

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
1.	Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan lebih jelas sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaturan kewenangan pengambilan keputusan telah ditetapkan berdasarkan pada tingkat jabatan dalam organisasi, tugas, fungsi, kebijakan dan strategi organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.
		STS (4)	Seluruh kewenangan pengambilan keputusan saat ini telah sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi.
		TS (3)	Sebagian besar kewenangan pengambilan keputusan saat ini telah sesuai dengan kebijakan dan strategi organisasi.
		S (2)	Sebagian besar kewenangan pengambilan keputusan saat ini perlu disesuaikan dengan kebijakan dan strategi organisasi.
		SS (1)	Seluruh kewenangan pengambilan keputusan saat ini perlu disesuaikan dengan kebijakan dan strategi organisasi.
2	Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pada sentralisasi (pemusatan struktur) pada organisasi ada/tidak mengindikasikan bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi cenderung mengambil alih atau mengurangi kewenangan pengambilan keputusan dari tingkatan manajemen yang lebih rendah.
		STS (1)	Setiap tingkatan manajemen tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
		TS (2)	Sebagian besar tingkatan manajemen tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
		S (3)	Sebagian besar tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
		SS (4)	Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan peran Pimpinan Tinggi Madya dalam membuat/mengambil

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
	mengambil alih keputusan dari kewenangan tingkatan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya).		keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan Pimpinan Tinggi Pratama.
		STS (4)	Secara menyeluruh tidak terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan yang menjadi wewenang tingkatan manajemen yang lebih rendah.
		TS (3)	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi cenderung mengambil alih sebagian keputusan yang menjadi wewenang tingkatan manajemen yang lebih rendah.
		S (2)	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi cenderung tidak mengambil alih sebagian keputusan yang menjadi kewenangan tingkatan manajemen yang lebih rendah.
		SS (1)	Secara menyeluruh terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi selalu mengambil alih keputusan yang menjadi kewenangan tingkatan manajemen yang lebih rendah.
4.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah mengambil keputusan melebihi kewenangannya	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan peran Pimpinan Tinggi Pratama dalam membuat/mengambil keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan Pimpinan Tinggi Madya.
		STS (4)	Secara menyeluruh tidak terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah mengambil keputusan yang melebihi kewenangannya.
		TS (3)	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah cenderung tidak mengambil keputusan yang melebihi kewenangannya.
		S (2)	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah cenderung mengambil keputusan yang melebihi kewenangannya.
		SS (1)	Secara menyeluruh terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah selalu mengambil keputusan yang melebihi kewenangannya.

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
5.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk	Penjelasan umum	<p>Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat keputusan instansi induk (kementerian/kantor) yang mampu menyelesaikan masalah yang terjadi antar bidang/sektor.</p> <p>Contoh: penyelesaian permasalahan yang melibatkan antar Jabatan Pimpinan Madya diputuskan oleh Menteri/JPT Utama dengan Keputusan Menteri/JPT Utama</p>
		STS (1)	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral (jabatan pimpinan madya) secara menyeluruh belum dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja organisasi/instansi induk (Menteri/JPT Utama)
		TS (2)	Penanganan permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral (jabatan pimpinan madya) sebagian besar belum dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja organisasi/instansi induk (Menteri/JPT Utama)
		S (3)	Penanganan permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral (jabatan pimpinan madya) sebagian besar telah dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja organisasi/instansi induk (Menteri/JPT Utama)
		SS (4)	Penanganan permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral (jabatan pimpinan madya) secara menyeluruh telah dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja organisasi/instansi induk (Menteri/JPT Utama)
6.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi induk	Penjelasan umum	<p>Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya keputusan dari Jabatan Pimpinan Utama/Menteri yang menangani masalah antar bidang/sektor.</p> <p>Contoh: penyelesaian permasalahan yang melibatkan antar Jabatan Pimpinan Madya selalu diputuskan oleh Menteri/JPT Utama.</p>
		STS (1)	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral tidak pernah diputuskan oleh

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
			manajemen tertinggi dari instansi induk (Menteri/JPT Utama).
		TS (2)	Sebagian kecil permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi induk (Menteri/JPT Utama).
		S (3)	Sebagian besar permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi induk (Menteri/JPT Utama).
		SS (4)	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral selalu diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi induk (Menteri/JPT Utama).
7	Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Pimpinan utama hanya membuat/menyusun keputusan strategis (keputusan yang mempunyai keterkaitan dan dampak signifikan terhadap visi, misi, strategi dan program serta perubahan organisasi secara menyeluruh/bersifat nasional) atau juga ikut membuat/menyusun keputusan/langkah-langkah taktis maupun teknis yang menjadi tugas/kewenangan di bawahnya. Contohnya keputusan perubahan organisasi pada tingkat Setjen/Ditjen/Itjen/Deputi/Badan.
		STS (1)	Pimpinan utama instansi secara menyeluruh tidak hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.
		TS (2)	Sebagian besar pimpinan utama instansi tidak hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.
		S (3)	Sebagian besar pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.
		SS (4)	Pimpinan utama instansi secara menyeluruh hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.
8	Pimpinan Madya pada tingkat manajemen mempunyai wewenang untuk membuat	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah wewenang untuk membuat keputusan yang bersifat taktis dan manajerial (keputusan yang terkait dengan

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
	keputusan-keputusan taktis dan manajerial.		posisi kewenangan dalam pelaksanaan visi, misi, strategi dan program; contohnya keputusan pada level Ditjen yang selanjutnya diturunkan pada level di bawahnya [Direktorat, Subdit dan Seksi]) telah dimiliki oleh Pimpinan Madya pada tingkat manajemen.
		STS (1)	Pimpinan Madya pada tingkat manajemen secara menyeluruh tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis taktis dan manajerial.
		TS (2)	Sebagian besar Pimpinan Madya pada tingkat manajemen tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis taktis dan manajerial.
		S (3)	Sebagian besar Pimpinan Madya pada tingkat manajemen mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis taktis dan manajerial.
		SS (4)	Pimpinan Madya pada tingkat manajemen secara menyeluruh mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis taktis dan manajerial.
9	Pimpinan Pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan teknis operasional (keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai implementasi dari visi, misi, strategi dan program), contohnya Keputusan mengenai pedoman SOP pada Organisasi Perangkat Daerah telah dimiliki oleh Pimpinan Pratama pada unit operasional.
		STS (1)	Pimpinan Pratama pada unit operasional secara menyeluruh tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.
		TS (2)	Sebagian besar Pimpinan Pratama pada unit operasional tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.
		S (3)	Sebagian besar Pimpinan Pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
		SS (4)	Pimpinan Pratama pada unit operasional secara menyeluruh mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.
10	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pimpinan instansi (Pimpinan Pratama) telah memberikan disposisi/kewenangan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah (Jabatan Administrator) terkait penyusunan keputusan.
		STS (1)	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan sepenuhnya tidak diberikan oleh pimpinan instansi (Pimpinan Pratama) kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah (Jabatan Administrator)
		TS (2)	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan sebagian besar tidak diberikan oleh pimpinan instansi (Pimpinan Pratama) kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah (Jabatan Administrator)
		S (3)	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan sebagian besar diberikan oleh pimpinan instansi (Pimpinan Pratama) kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah (Jabatan Administrator)
		SS (4)	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan sepenuhnya diberikan oleh pimpinan instansi (Pimpinan Pratama) kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah (Jabatan Administrator)
11	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan organisasi tingkat bawah	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidak pengutusan atau pemberian wewenang dari pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan organisasi tingkat di bawahnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional.
		STS (1)	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional sepenuhnya belum diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan organisasi tingkat bawahnya

No.	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
		TS (2)	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional sebagian besar belum diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah kepemimpinan organisasi tingkat bawahnya
		S (3)	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional sebagian besar telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah kepemimpinan organisasi tingkat bawahnya
		SS (4)	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional sepenuhnya telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah kepemimpinan organisasi tingkat bawahnya

b. DIMENSI PROSES

1. SUBDIMENSI KESELARASAN

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
1	Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi	Penjelasan Umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis (terjemahan/turunan dari tujuan organisasi yang terdapat dalam rencana strategis) memiliki keterkaitan dan keselarasan yang kuat dan jelas dengan visi, misi dan tujuan organisasi (terjemahan dari visi organisasi),
		STS (1)	Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah (JPT Madya (Kedeputan), JPT Pratama (Biro/Asisten Deputi/Inspektorat), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Staf dan Jabatan Fungsional) tidak memiliki keterkaitan dengan visi dan misi organisasi.
		TS (2)	Sebagian besar sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah tidak memiliki keterkaitan dengan visi dan misi organisasi.
		S (3)	Sebagian besar sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah memiliki keterkaitan dengan visi dan misi organisasi.
		SS (4)	Sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah secara menyeluruh memiliki keterkaitan dengan visi dan misi organisasi.
2	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perumusan proses bisnis dan standar operasional prosedur telah mencerminkan keterkaitan dan keselarasan antara aktivitas kerja dengan tugas dan fungsi serta dengan jabatan/fungsi, visi, misi dan tujuan organisasi.
		STS (1)	Setiap proses kerja pada unit (JPT Madya (Kedeputan), JPT Pratama (Biro/Asisten Deputi/Inspektorat), Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Staf dan Jabatan Fungsional) yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar operasional prosedur tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
		TS (2)	Sebagian besar proses kerja yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar operasional prosedur tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.
		S (3)	Sebagian besar proses kerja yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.
		SS (4)	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam proses bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.
3	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perumusan pedoman kerja yang tertuang di dalam SOP telah mencerminkan keterkaitan dan keselarasan antara aktivitas kerja dengan tugas dan fungsi serta dengan jabatan/fungsi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa berbagai aktivitas kerja yang ada harus terkait dan selaras dengan uraian tugas dan fungsi. Demikian pula uraian tugas dan fungsi harus sesuai dengan uraian jabatan/posisi yang terdapat di dalam struktur organisasi.
		STS (1)	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.
		TS (2)	Sebagian besar proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.
		S (3)	Sebagian besar proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.
		SS (4)	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
4	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan dan keselarasan proses kerja secara vertikal dari organisasi yang tingkatannya lebih tinggi dengan organisasi yang tingkatannya lebih rendah (di bawahnya).
		STS (1)	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu tidak mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).
		TS (2)	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah sebagian besar tidak mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).
		S (3)	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah sebagian besar mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).
5	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah dipetakan/didokumentasikan dengan baik.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan dan keselarasan proses kerja di antara berbagai unit organisasi yang tidak memiliki hubungan vertikal secara langsung.
		STS (1)	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi secara menyeluruh belum dipetakan/didokumentasikan dengan baik.

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
		TS (2)	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi sebagian besar belum dipetakan/didokumentasikan dengan baik.
		S (3)	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi sebagian besar telah dipetakan/didokumentasikan dengan baik.
		SS (4)	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi secara menyeluruh telah dipetakan/didokumentasikan dengan baik.
6	Koordinasi antar unit kerja selalu dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.		Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antar unit kerja yang lebih kecil di dalam suatu unit organisasi dari sisi koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang saling berkaitan.
		STS (1)	Koordinasi antar unit kerja selalu dilakukan dengan kurang baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.
		TS (2)	Koordinasi antar unit kerja sebagian besar dilakukan dengan kurang baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.
		S (3)	Koordinasi antar unit kerja sebagian besar dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.
		SS (4)	Koordinasi antar unit kerja selalu dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.
7	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan proses lintas bidang atau sektoral antar organisasi tersebut telah dipetakan di organisasi responden. Responden diharapkan untuk menilai berdasarkan kejelasan dokumen hubungan kerja antar organisasi atau instansi yang berbeda bidang/sektor dengan organisasi.
		STS (1)	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral secara menyeluruh belum dipetakan secara jelas.

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
		TS (2)	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral sebagian besar belum dipetakan secara jelas.
		S (3)	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral sebagian besar telah dipetakan secara jelas.
		SS (4)	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral secara menyeluruh telah dipetakan secara jelas.
8	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan baik.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan koordinasi kerja antara organisasi Responden dengan instansi/organisasi lintas bidang/sektor. Responden dapat menilik dari pelaksanaan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi yang terjadi (apakah terjadwal secara rutin atau tidak, frekuensinya sering atau jarang, dsb.) dan berbagai bentuk komunikasi lainnya.
		STS (1)	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait secara menyeluruh belum terlaksana dengan baik.
		TS (2)	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait sebagian besar belum terlaksana dengan baik.
		S (3)	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait sebagian besar telah terlaksana dengan baik.
		SS (4)	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait secara menyeluruh telah terlaksana dengan baik.

2. SUBDIMENSI TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) DAN KEPATUHAN (*COMPLIANCE*)

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan.	Penjelasan Umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku di organisasi telah menaati (mematuhi) peraturan perundangan yang berlaku. Contoh ketidaksesuaian struktur antara lain dapat berupa ukuran atau jumlahnya yang melebihi ketentuan yang berlaku (karena adanya penambahan) dan nomenklatur yang tidak mengikuti ketentuan. Sedangkan contoh ketidaksesuaian tata kerja antara lain dapat berupa perincian tugas pokok dan fungsi yang tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.
		STS (1)	Jika SOTK dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan staf secara menyeluruh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah dan kelembagaan kementerian.
		TS (2)	Jika sebagian besar SOTK dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan staf tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah dan kelembagaan kementerian.
		S (3)	Jika SOTK dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawa, Pelaksana dan staf sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah dan kelembagaan kementerian.
		SS (4)	Jika SOTK dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan staf secara menyeluruh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah dan kelembagaan kementerian.

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
2	Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.	Penjelasan Umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kepentingan strategis <i>stakeholders</i> (pemangku kepentingan) telah dipetakan dengan jelas, agar dapat diberi perhatian dan dipelihara dengan baik, dalam rangka meningkatkan partisipasinya dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi organisasi.
		STS (1)	Jika kepentingan strategis <i>stakeholder</i> dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana secara menyeluruh tidak/belum dipetakan.
		TS (2)	Jika sebagian besar kepentingan strategis <i>stakeholder</i> dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana tidak/belum dipetakan.
		S (3)	Jika sebagian besar kepentingan strategis <i>stakeholder</i> dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana tidak/belum dipetakan dan digunakan secara parsial.
		SS (4)	Jika kepentingan strategis <i>stakeholder</i> dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana secara menyeluruh telah dipetakan dan digunakan secara sistematis
3	Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia telah dijalankan secara transparan (transparansi).	Parameter umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah menerapkan keterbukaan informasi publik di dalam proses kerjanya; dalam hal ini, proses kerja telah dikomunikasi kepada masyarakat dengan baik atau masyarakat dapat mengakses informasi publik terkait dengan proses kerja organisasi. Keterbukaan informasi publik memiliki konsekuensi bahwa masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama memiliki hak untuk mengakses segala informasi publik (yang bukan rahasia negara) yang dikandung di dalam proses kerja organisasi.
		STS (1)	Jika proses kerja terkait kebutuhan informasi public secara menyeluruh tidak dijalankan secara transparan , misalnya dalam

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			pelayanan Kementerian dan unit kerja proses layanan yang dilaksanakan tidak disampaikan secara transparan dan hanya diketahui oleh sebagian pejabat/pegawai.
		TS (2)	Jika sebagian besar proses kerja terkait kebutuhan informasi public tidak dijalankan secara transparan , misalnya dalam pelayanan Kementerian dan unit kerja proses layanan yang dilaksanakan tidak disampaikan secara transparan dan hanya diketahui oleh sebagian pejabat/pegawai.
		S (3)	Jika sebagian besar proses kerja terkait kebutuhan informasi publik telah dijalankan secara transparan , misalnya dalam pelayanan Kementerian dan unit kerja, proses layanan yang dilaksanakan dilakukan secara transparan dan secara sistem layanan diketahui semua pihak terkait.
		SS (4)	Jika proses kerja terkait kebutuhan informasi publik secara menyeluruh telah dijalankan secara transparan , misalnya dalam pelayanan Kementerian dan unit kerja, proses layanan yang dilaksanakan dilakukan secara transparan dan secara sistem layanan diketahui semua pihak terkait.
4	Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kejelasan akuntabilitas dari setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi dan manajemen menengah ke bawah. Terkait dengan aspek akuntabilitas, hal yang ingin diketahui antara lain adalah kejelasan mengenai: fungsi-fungsi apa saja yang terlibat di dalam setiap tahap proses kerja, bentuk keterlibatan dari fungsi-fungsi tersebut, penanggung jawab dari fungsi tersebut, serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawabannya.
		STS (1)	Jika setiap tahapan pekerjaan dalam proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas). Sebagai contoh setiap tahapan dalam proses kerja yang dilakukan

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			pada setiap fungsi dan struktur menghasilkan suatu <i>output/outcome</i> (indikator dan target kinerja) yang saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya.
		TS (2)	Jika sebagian besar tahapan pekerjaan dalam proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas). Sebagai contoh setiap tahapan dalam proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur menghasilkan suatu <i>output/outcome</i> (indikator dan target kinerja) yang saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya.
		S (3)	Jika sebagian besar tahapan pekerjaan dalam proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana telah memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas). Sebagai contoh setiap tahapan dalam proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur menghasilkan suatu <i>output/outcome</i> (indikator dan target kinerja) yang saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya
		SS (4)	Jika setiap tahapan pekerjaan dalam proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana seluruhnya telah memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas). Sebagai contoh setiap tahapan dalam proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur menghasilkan suatu <i>output/outcome</i> (indikator dan target kinerja) yang saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya
5	Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas sistem dan mekanisme pelaporan proses kerja di

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
	pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab).		organisasi Saudara. Di dalam setiap proses kerja yang baik tentu harus terdapat informasi yang memadai tentang pelaksanaan proses kerja dari awal hingga selesai. Informasi yang memadai ini disampaikan dalam sistem dan mekanisme pelaporan yang mencakup kelengkapan informasi pelaksanaan proses kerja, kejelasan informasi, dan distribusi/aksesibilitas informasi tersebut. Secara ideal tiga hal ini perlu dituangkan di dalam sistem pelaporan proses kerja yang mekanismenya bersifat <i>real time</i> (langsung seketika ketika setiap tahapan pekerjaan dalam proses kerja selesai dikerjakan), informasinya lengkap dan relevan (sesuai kebutuhan proses kerja), serta saling terkoordinasi dan terkomunikasikan dengan baik di antara fungsi-fungsi dan unit kerja yang terkait.
		STS (1)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab). Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya.
		TS (2)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab). Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya.
		S (3)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			jawab). Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya
		SS (4)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab). Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap fungsi dan struktur saling terkait secara berjenjang dan setiap pegawai bertanggungjawab sesuai tingkatannya
6	Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana independensi (kemandirian) yang telah ditetapkan tersebut tidak diintervensi (secara tidak perlu) oleh pimpinan unit kerja yang memiliki proses kerja dan (atau) oleh pimpinan unit organisasi di atasnya. Prinsip independensi atau kemandirian di dalam tata kelola organisasi pemerintahan yang (<i>good governance</i>) mengisyaratkan bahwa proses kerja harus dapat dilaksanakan secara mandiri oleh fungsi-fungsi dan (atau) unit kerja yang bertanggung jawab sesuai dengan standar prosedur operasi yang berlaku.
		STS (1)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana terdapat indikasi intervensi dari tingkat atas ke bawah. Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan sistem prosedur yang berlaku.
		TS (2)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana terdapat indikasi intervensi dari tingkat atas ke bawah. Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap tugas, fungsi dan

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			kewenangan sesuai dengan peraturan dan sistem prosedur yang berlaku
		S (3)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak terdapat indikasi intervensi dari tingkat atas ke bawah. Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan sistem prosedur yang berlaku
		SS (4)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak terdapat indikasi intervensi dari tingkat atas ke bawah. Sebagai contoh setiap proses kerja yang dilakukan pada setiap tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan sistem prosedur yang berlaku
7	Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kewajaran (<i>fairness</i>) yang ada di dalam proses kerja di organisasi dengan menggunakan dua indikator (beban kerja dan pengakuan/penilaian kinerja yang wajar). Pernyataan ini ingin mengetahui sejauh mana tingkat kewajaran (<i>fairness</i>) dari pelaksanaan proses kerja di lingkungan organisasi Saudara. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai petunjuk kewajaran (<i>fairness</i>) antara lain adalah sejauh mana beban kerja di antara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja terdistribusi secara wajar sesuai dengan karakteristik peran dari masing-masing fungsi. Fungsi-fungsi utama (<i>core functions</i>) tentu secara wajar harus memiliki proporsi beban kerja yang lebih besar dibandingkan fungsi-fungsi pendukung (<i>supporting functions</i>). Selain itu kewajaran dalam proses kerja dapat juga dilihat dari sisi sejauh mana kesuksesan penyelesaian suatu tahapan kerja (di dalam suatu proses kerja) oleh suatu fungsi yang melakukannya mendapat pengakuan yang wajar di dalam penilaian kinerja. Di dalam suatu proses kerja yang

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			memiliki tingkat kewajaran (<i>fairness</i>) yang memadai, apabila suatu fungsi dapat menyelesaikan tugas dengan baik di dalam suatu tahapan kerja maka fungsi tersebut harus mendapat penilaian kinerja yang baik.
		STS (1)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memperhatikan <i>fairness</i> dalam pembagian beban kerja di antara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja terdistribusi secara wajar sesuai dengan karakteristik peran dari masing-masing fungsi. Sebagai contoh: indikator kinerja pada setiap fungsi memiliki <i>fairness</i> di antara satu tingkatan, jika pada tingkat pelaksana kategori indikator kinerja bersifat <i>output</i> sama halnya dengan tingkat pelaksana di fungsi lainnya.
		TS (2)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana tidak memperhatikan <i>fairness</i> dalam pembagian beban kerja di antara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja terdistribusi secara wajar sesuai dengan karakteristik peran dari masing-masing fungsi. Sebagai contoh: indikator kinerja pada setiap fungsi memiliki <i>fairness</i> di antara satu tingkatan, jika pada tingkat pelaksana kategori indikator kinerja bersifat <i>output</i> sama halnya dengan tingkat pelaksana di fungsi lainnya.
		S (3)	Jika sebagian besar proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana memperhatikan <i>fairness</i> dalam pembagian beban kerja di antara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja terdistribusi secara wajar sesuai dengan karakteristik peran dari masing-masing fungsi. Sebagai contoh: indikator kinerja pada setiap fungsi memiliki <i>fairness</i> di antara satu tingkatan, jika pada tingkat pelaksana kategori indikator kinerja

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			bersifat <i>output</i> sama halnya dengan tingkat pelaksana di fungsi lainnya.
		SS (4)	Jika setiap proses kerja dari tingkat Kementerian, JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sampai dengan Pelaksana memperhatikan <i>fairness</i> dalam pembagian beban kerja di antara fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu proses kerja terdistribusi secara wajar sesuai dengan karakteristik peran dari masing-masing fungsi. Sebagai contoh: indikator kinerja pada setiap fungsi memiliki <i>fairness</i> di antara satu tingkatan, jika pada tingkat pelaksana kategori indikator kinerja bersifat <i>output</i> sama halnya dengan tingkat pelaksana di fungsi lainnya.

3. SUBDIMENSI PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PROSES

No.	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
1	Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah melaksanakan perbaikan dan peningkatan proses organisasi dari sisi prosedur operasional standar yang terdapat di dalam organisasi. Bilamana evaluasi telah dilakukan secara periodik maka dapat diindikasikan (secara positif) bahwa salah satu unsur perbaikan dan peningkatan proses organisasi telah dilaksanakan. Sebagaimana dalam pasal 3 PermenPAN No. 11/2009 tentang Penetapan SOP di Kementerian PAN menyatakan bahwa “SOP dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi” dan pasal 6 menyatakan bahwa “setiap pimpinan unit kerja melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan SOP dilingkungan unit kerja masing-masing”.
		STS (1)	Jika seluruh SOP unit kerja masing-masing tidak dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta diperbarui secara periodik.
		TS (2)	Jika sebagian besar SOP unit kerja masing-masing tidak dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta diperbarui secara periodik.
		S (3)	Jika sebagian besar SOP unit kerja masing-masing dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta diperbarui secara periodik.
		SS (4)	Jika seluruh SOP unit kerja masing-masing dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta diperbarui secara periodik.
2	Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kecenderungan lembam/lambat (<i>inertia</i>) dari sisi prosedur operasional yang terdapat di dalam organisasi Responden. Bilamana lebih dari 50% SOP yang adalah SOP yang ditetapkan lebih dari lima tahun yang lalu maka hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa pelaksanaan perbaikan dan peningkatan proses organisasi dari sisi prosedur operasional kerja tidak terlaksana dengan baik.

No.	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
		STS (4)	Jika sebagian besar SOP masing-masing unit kerja (lebih dari 50%) dinilai tidak perlu segera diperbaharui karena merelevan dengan dinamika tugas dan fungsi
		TS (3)	Jika sebagian kecil SOP masing-masing unit kerja (10%-50%) dinilai tidak perlu segera diperbaharui karena merelevan dengan dinamika tugas dan fungsi
		S (2)	Jika sebagian kecil SOP masing-masing unit kerja (10%-50%) dinilai perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.
		SS (1)	Jika sebagian besar SOP masing-masing unit kerja (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.
3	Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah mengagendakan perbaikan proses kerja (<i>work process improvement</i>) secara rutin dan terus-menerus (<i>continous improvement</i>). Sebagaimana dalam pasal 3 PermenPAN No. 11/2009 tentang Penetapan SOP di Kementerian PANRB menyatakan bahwa “SOP dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi” dan pasal 6 menyatakan bahwa “setiap pimpinan unit kerja melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan SOP dilingkungan unit kerja masing-masing”.
		STS (1)	Jika unit kerja masing-masing tidak pernah melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja (proses bisnis dan SOP)
		TS (2)	Jika unit kerja masing-masing terkadang tidak melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja (proses bisnis dan SOP)
		S (3)	Jika unit kerja masing-masing terkadang melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja (proses bisnis dan SOP)
		SS (4)	Jika unit kerja masing-masing selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja (proses bisnis dan SOP)
4	Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perbaikan dan peningkatan proses kerja organisasi lebih berorientasi dan difokuskan pada hal-hal yang bersifat rutin dan berulang

No.	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
	hal-hal yang bersifat strategis		dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
		STS (4)	Jika seluruh unit kerja terindikasi tidak melakukan perbaikan dan peningkatan proses kerja organisasi yang lebih berorientasi pada hal-hal bersifat strategis, tidak difokuskan pada hal-hal yang bersifat rutin.
		TS (3)	Jika sebagian besar unit terindikasi tidak melakukan perbaikan dan peningkatan proses kerja organisasi yang lebih berorientasi pada hal-hal bersifat strategis, tidak difokuskan pada hal-hal yang bersifat rutin. Sebagai contoh sejalan dengan penerapan SPBE setiap proses kerja yang ada saat ini berupa tahapan proses yang rutin/berulang dapat dilakukan simplifikasi tahapan dengan penerapan aplikasi tertentu. Dilakukan review terhadap hasil kerja organisasi (<i>outcome/output</i>) pada setiap level organisasi sehingga penjenjangannya bertingkat secara proporsional dan tepat.
		S (2)	Jika sebagian besar unit kerja terindikasi melakukan perbaikan dan peningkatan proses kerja organisasi yang lebih berorientasi dan difokuskan pada hal-hal bersifat rutin dan berulang dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
		SS (1)	Jika seluruh unit kerja terindikasi melakukan perbaikan dan peningkatan proses kerja organisasi yang lebih berorientasi dan difokuskan pada hal-hal bersifat rutin dan berulang dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.

4. SUBDIMENSI MANAJEMEN RISIKO

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
1	Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memperkenalkan konsep manajemen risiko (metode yang dipersiapkan dalam menghadapi setiap kemungkinan risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi).
		STS (1)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu belum diperkenalkan mengenai manajemen risiko.
		TS (2)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu belum diperkenalkan mengenai manajemen risiko.
		S (3)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu telah diperkenalkan mengenai manajemen risiko.
		SS (4)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu telah diperkenalkan mengenai manajemen risiko.
2	Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah menetapkan kebijakan tentang manajemen risiko.
		STS (1)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh belum memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko.
		TS (2)	Jika instansi bapak/ibu belum cukup memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko.
		S (3)	Jika instansi bapak/ibu telah cukup memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko.
		SS (4)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh telah memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko.
3	Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden mampu mengidentifikasi risiko-risiko utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
		STS (1)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu belum mengidentifikasi risiko-risiko utamanya
		TS (2)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu belum mengidentifikasi risiko-risiko utamanya
		S (3)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu telah mengidentifikasi risiko-risiko utamanya
		SS (4)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu telah mengidentifikasi risiko-risiko utamanya

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
4	Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah melakukan pengukuran terhadap peluang dan dampak risiko dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
		STS (4)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu telah mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi dengan metode yang memadai.
		TS (3)	Jika sebagian besar unit kerja instansi bapak/ibu telah mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi dengan metode yang memadai.
		S (2)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu belum mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi dengan metode yang memadai.
		SS (1)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu belum mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi dengan metode yang memadai.
5	Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku.
		STS (4)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
		TS (3)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
		S (2)	Jika sebagian besar unit kerja di instansi bapak/ibu belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
		SS (1)	Jika seluruh unit kerja di instansi bapak/ibu belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
6	Organisasi telah memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.
		STS (4)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh belum memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.
		TS (3)	Jika instansi bapak/ibu belum cukup memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.

No	Pernyataan	Parameter	Penjelasan
		S (2)	Jika instansi bapak/ibu telah cukup memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang cukup memadai.
		SS (1)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh telah memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.

5. SUBDIMENSI TEKNOLOGI INFORMASI

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
1	Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi	Penjelasan umum	Pertanyaan dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memiliki rancangan/skema arsitektur (<i>roadmap</i>) penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses kerjanya.
		STS (1)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh belum memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi
		TS (2)	Jika instansi bapak/ibu belum cukup memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi
		S (3)	Jika instansi bapak/ibu telah cukup memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi
		SS (4)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi.
2	Organisasi telah memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memiliki kebijakan tentang implementasi Teknologi Informasi yang telah dituangkan secara lengkap dan rinci serta ditetapkan secara resmi.
		STS (1)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh belum memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.
		TS (2)	Jika instansi bapak/ibu belum cukup memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.
		S (3)	Jika instansi bapak/ibu telah cukup memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.
		SS (4)	Jika Kementerian PANRB secara menyeluruh telah memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.
3	Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai pada sebagian besar proses kerja.
		STS (1)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh belum memanfaatkan teknologi informasi dengan memadai pada sebagian besar proses kerja.
		TS (2)	Jika instansi bapak/ibu belum cukup memanfaatkan teknologi informasi secara memadai pada sebagian kecil proses kerja.
		S (3)	Jika instansi bapak/ibu telah cukup memanfaatkan teknologi informasi secara memadai pada sebagian kecil proses kerja.
		SS (4)	Jika instansi bapak/ibu secara menyeluruh telah memanfaatkan

No	Pertanyaan	Parameter	Penjelasan
			teknologi informasi dengan memadai pada sebagian besar proses kerja.
4	Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai pada sebagian besar proses kerja.
		STS (4)	Jika sebagian besar proses kerja di instansi bapak/ibu tidak lagi dilaksanakan secara manual (<i>electronification</i>).
		TS (3)	Jika sebagian kecil proses kerja di instansi bapak/ibu tidak lagi dilaksanakan secara manual (<i>electronification</i>).
		S (2)	Jika sebagian kecil proses kerja di instansi bapak/ibu masih dilaksanakan secara manual.
		SS (1)	Jika sebagian besar proses kerja di instansi bapak/ibu masih dilaksanakan secara manual.
5	Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.	Penjelasan umum	Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi Responden telah memublikasikan seluruh informasi publik (sejalan dengan aturan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik) terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi secara periodik di dalam <i>website</i> /laman organisasi.
		STS (1)	Jika seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.
		TS (2)	Jika sebagian besar informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.
		S (3)	Jika sebagian besar informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.
		SS (4)	Jika seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.

A. Penjelasan Pengisian Esai

Pengisian kuesioner yang telah dilakukan ditindaklanjuti dengan penjelasan esai sebagai justifikasi terhadap kuesioner. Adapun Pertanyaan terbuka yang harus diisi oleh tim pelaksana evaluasi kelembagaan, yaitu terkait dengan:

a. Dimensi Struktur

Pertanyaan terkait dimensi struktur terdiri dari 6 (enam) pertanyaan, sebagai berikut:

1. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, bagaimana kondisi umum struktur organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi:
 - a) Kompleksitas organisasi di dalam mengakomodir differensiasi (keragaman) tugas dan fungsi yang ada.
 - b) Formalisasi sebagai suatu wujud penyeragaman atau standarisasi terhadap berbagai ketentuan/aturan, kebijakan, strategi, prosedur, pola koordinasi dan komunikasi, serta pembakuan berbagai aspek penting lain di dalam organisasi.
 - c) Sentralisasi dalam hal kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan kebijakan serta kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan keputusan dan kebijakan.
2. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan dan sinkronisasi struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dengan visi, misi, dan strategi organisasi.
3. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana efektivitas struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dalam mengakomodir dan mendukung implementasi strategi dan program organisasi. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sejauh mana struktur organisasi yang ada dapat mencerminkan visi dan misi serta strategi organisasi.
4. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka pendek maupun jangka menengah.
5. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi terhadap aspek-aspek pokok proses organisasi.

6. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah.

Berikan analisis dan penilaian tim Saudara untuk masing-masing dari tiga subdimensi di atas secara lengkap, rinci dan mendalam serta argumentasi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan.

b. Dimensi Proses

Pertanyaan terkait dimensi proses terdiri dari 6 (enam) pertanyaan, sebagai berikut:

1. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, bagaimana kondisi umum proses organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.
2. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan dan sinkronisasi proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dengan visi-misi dan strategi organisasi.
3. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana efektivitas proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dalam mengakomodir strategi organisasi dan mendukung implementasi strategi dan program organisasi. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sejauh mana proses organisasi yang ada dapat mencerminkan visi dan misi serta strategi organisasi.
4. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka pendek maupun jangka menengah.
5. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dapat menyesuaikan

dan mengakomodir dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah.

Berikan analisis dan penilaian tim Saudara untuk masing-masing dari 5 (lima) subdimensi di atas secara lengkap, rinci dan mendalam serta argumentasi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalam bentuk dokumen tertulis, rekaman peristiwa/kejadian, dan dokumentasi lain yang relevan.

-----0-----